

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
(SPIP) DAN MORALITAS PEGAWAI TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD.**

(Studi Empiris SKPD di Kabupaten Limapuluh Kota)

ARTIKEL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi)



OLEH:

NURUL WAHYUNI
2011/1107577

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN MORALITAS PEGAWAI DALAM PENCEGAHAN
*FRAUD***

(Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota)

Oleh :

Nurul Wahyuni
1107577/2011

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
September 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 14 Agustus 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc.
NIP: 19771123 200312 1 003


Vita Fitria Sari, SE, M.Si.
NIP: 19870515 201012 2 009

ABSTRAK

Nurul Wahyuni (2011/1107577):Pengaruh Sistem Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Moralitas Pegawai dalam Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota/

Pembimbing: 1. Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak.

2. Vita Fitria Sari, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP), dan Moralitas Pegawai terhadap Pencegahan *Fraud* di SKPD yang terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner di SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang terdapat pada Kabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode total sampling sehingga diperoleh 135 responden dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan berupa data primer berupa kuisisioner yang diperoleh dari SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern perusahaan dan moralitas pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci : Pencegahan *fraud*, Sistem Pengendalian Intern Perusahaan, Moralitas Pegawai.

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence on the influence of Internal Control System (SPIP), and Employee Morality against Fraud Prevention in SKPD located in Limapuluh Kota District. The data of this research is obtained through the distribution of questionnaires in SKPD in district. Lima Puluh Kota. This type of research is categorized in causative research. The population in this research is SKPD which is found in Limapuluh Kota Regency. While the sample research is determined by the total sampling method so that 135 respondents obtained in this study. Types of data used in the form of primary data in the form of questionnaires obtained from SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

The results of this study indicate that the company's internal control system and employee morality have a significant positive effect on fraud prevention

Keyword : *Fraud Prevention, influence of Internal Control System and Employee Morality*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu akuntansi, selain memberikan manfaat juga menjadi salah satu sumber masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya kecurangan (*fraud*). Jika laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta dan bersifat material yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menipu maka dapat dikatakan sebagai kecurangan (Kurniawan, 2013). Kecurangan laporan keuangan adalah perilaku yang disengaja untuk menghasilkan laporan keuangan yang salah secara material (Amin, 2013). Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan hal yang sangat fatal. Laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban haruslah disajikan dengan andal dan relevan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut tidak dirugikan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang diganti dengan (PP) No. 71 tahun 2010 merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan.

Salah satu perilaku yang akan menimbulkan kerugian yang sangat besar adalah kecurangan dalam

pelaporan keuangan, dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan ilegal melalui pelanggaran hukum pribadi atau publik.

Menurut Tunggal (2010) kecurangan atau *fraud* dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu penyembunyian (*concealment*), kesempatan atau peluang, motivasi, daya tarik dan adanya keberhasilan. Kecurangan tentu akan merusak nama baik dan reputasi dari pemerintah pusat sebagai wadah induk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Sehingga sebaiknya dalam proses operasional pemerintah perlu diminimalisir adanya kecurangan salah satu caranya adalah dengan menerapkan pencegahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat pemerintah daerah, ketiga badan pengawas yaitu badan pengawas provinsi untuk tingkat provinsi, badan pengawas kabupaten dan kota berubah nonmenklaturnya menjadi inspektorat provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dan kewenangan inspektorat sebagai bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah mendeteksi dan menginvestigasi *fraud*.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem

pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan sistem. Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang berbuat bohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006).

Banyaknya kasus kecurangan dibidang keuangan yang terjadi di lingkungan pemerintah diseluruh Indonesia, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pada kinerja keuangan pemerintahan. Kegiatan tersebut diberi nama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan didalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai dalam rangka memberikan keyakinan kepada publik atau masyarakat bahwa keberhasilan instansi pemerintah untuk mencapai kinerja yang optimal juga didukung oleh sistem akuntansi yang mendorong lembaga untuk memiliki laporan keuangan efisien. Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan SPIP adalah membuat dan melaporkan laporan keuangan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien dan *reliability* yang didasarkan pada ketaatan terhadap peraturan undang-undangan (Herianto, 2015).

Sistem pengendalian intern pemerintah harus diselenggarakan oleh

seluruh pihak dilingkungan pemerintah dan daerah. Penerapan SPIP menegaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati / walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pentingnya Sistem Pengendalian intern adalah memberikan sinyal yang baik pada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan secara efisien dan efektif. Menurut Anshah dan Ganguli (2010), manajemen yang menerapkan sistem pengendalian intern, memberikan sinyal bahwa organisasi berjalan dengan baik, efisien, efektif dan taat pada peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi indikator kepatuhan, transparansi dan akuntabel pada pemangku kepentingan, dan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan (Hyde, 2011). Selain itu, efektifitas SPI merupakan salah satu kriteria penilaian untuk pemberian opini laporan keuangan pemerintahan oleh BPK (UU No.15 tahun 2004).

Menurut Budiningsih (2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Menurut Amrizal (2004), peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika prilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan

suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dalam suatu organisasi, terutama unit organisasi yang besar dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi.

Terjadinya sejumlah kecurangan dilingkungan lembaga pemerintah daerah merupakan cerminan rendahnya moral yang dimiliki karyawan di bagian keuangan atau non keuangan pada lembaga pemerintah daerah. Dekadensi moral dan pemahaman terhadap agama yang lemah menjadi faktor penyebab terjadinya *fraud* dan hal ini akan menurunkan upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan pemerintah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) moral merupakan nilai kebaikan dan keburukan yang terbentuk dalam diri individu atau pelaku akuntansi yang dapat filter didalam mengambil berbagai tindakan. Salah satu faktor penting yang dapat membentuk moral adalah agama, keluarga, pendidikan formal dan lingkungan masyarakat.

Salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang sampai saat ini memiliki prestasi yang cukup baik dalam pengelolaan sistem akuntansi pemerintah adalah kabupaten Limapuluh Kota. Kabupaten tersebut mendapat predikat hasil audit dari audit internal nasional berupa wajar dengan pengecualian (WDP). Jika

dilihat dari opini audit ini, hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan Inspektur Kabupaten/Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten di Sumatera Barat yang sampai saat ini memiliki prestasi yang kurang baik dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Kabupaten tersebut mendapat predikat hasil audit dari auditor internal nasional berupa wajar dengan pengecualian (WDP). Jika dilihat dari opini audit, status wajar dengan pengecualian belum menjadi yang terbaik, dan masih dapat ditingkatkan.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa opini audit yang diberikan auditor pemerintah untuk kabupaten Limapuluh Kota tidak berubah dalam lima tahun terakhir, keadaan tersebut menunjukkan tidak adanya kemajuan yang berarti dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Didalam opini audit yang diterangkan masih menunjukkan adanya celah untuk melakukan kecurangan, mengingat didalam opini ada kata “Wajar dengan Pengecualian” makna yang tersirat menunjukkan bahwa laporan keuangan yang di audit dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Limapuluh Kota masih rentan dengan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain dapat dilihat upaya pencegahan kecurangan di instansi pemerintahan ini masih belum optimal sehingga kinerja pemerintahan

masih memiliki asumsi kecurangan yang cukup tinggi.

Dalam temuan BPK No. 18.A/LHP/XVII.PDG/05/2014 tanggal 22 Mei 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 karena permasalahan yang berkaitan dengan (1) penyajian nilai Kas di Bendahara Penerimaan belum menggambarkan nilai yang sebenarnya karena didalamnya termasuk sebesar Rp35,00 juta yang belum disetorkan ke Kas Daerah, (2) nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19,07 miliar tidak disajikan dengan rincian yang memadai. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Kesehatan menindaklanjuti Kas di Bendahara Penerimaan tersebut dengan menyeter ke Kas Daerah, dan melalui Bidang Aset DPPKAD dan Dinas Pendidikan telah meninjaklanjuti penyajian nilai Aset Tetap namun belum mencakup seluruh Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Taufeni (2011), meneliti tentang pengaruh peran inspektorat terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan peran inspektorat sebagai pengendalian dan pengawasan kinerja aparatur negara terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan. Sejalan dengan Amrizal (2004), yang menyimpulkan bahwa Jika struktur pengendalian intern sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak

terdeteksi akan banyak berkurang dan dengan kata lain kita dapat mencegah kecurangan yang akan terjadi. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya

Berdasarkan kepada uraian ringkas fenomena dan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencegahan kecurangan (*Fraud*) di lingkungan pemerintah daerah. Faktor utama yang menjadi pembeda antara penelitian saat ini dengan terdahulu adalah lokasi, dan waktu penelitian. Secara umum penelitian ini bersifat empiris yang berjudul: **Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Dan Moralitas Pegawai Dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Kota Limapuluh Kota).**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan fenomena maka diajukan sejumlah pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Limapuluh Kota ?.
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kota Limapuluh Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Perusahaan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui sejumlah variabel yang mempengaruhi pencegahankecurangan atau *fraud* terutama pada perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Praktisi hasil yang diperoleh juga dapat diajdikan sebagai acuan dan referensi yang tentunya dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang sejumlah variabel yang

mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan didalam lingkungan pemerintah daerah.

3. Akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pihak pihak yang berkepentingan terutama peneliti dimasa mendatang yang tertarik melakukan penelitian serupa dengan yang dibahas didalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud)

a. Pengertian Pencegahan *Fraud*

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain).

Defenisi *Fraud* menurut Black's Law Dictionary, kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan manusia dapat direncanakan, dilakukan oleh seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu.

Kecurangan menurut *The Institute of Internal Auditor* Amerika dalam Tunggal (2011), mendefenisikan kecurangan

mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (irregulation) dan tindakan illegal yang bercirikan penipuan yang disengaja, dan dapat dilakukan untuk manfaat dana atau kerugian organisasi oleh orang diluar atau didalam organisasi.

Sedangkan dari sisi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat awam sekalipun, fraud telah dipahami dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan merusak sendi-sendi budaya masyarakat. Jika fraud terjadi di sektor pemerintahan, maka hal ini merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat atau konsituen dan yang paling parah lagi, masyarakat atau konsituen akan kehilangan kepercayaan pada kemampuan kepemimpinan instansi pemerintahan dalam pemerintah.

Menurut BPKP (2008), kunci untuk mencegah dan mudah mendeteksi fraud adalah penerapan model penangkal multisegi (irganization-wide model of deterrence). Model ini mengandalkan keterlibatan penangkalan korupsi pada setiap level dan fungsi pada organisasi. Model ini meliputi tiga komponen yang saling berinteraksi yang dirancang untuk memaksimalkan kesempatan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud, yaitu (1) pengendalian keuangan (financial control); (2) sistem non-keuangan; dan (3) pengawasan dan perilaku manajemen (management oversight and behavior).

Adapun definisi *fraud* menurut BPK RI (2007) adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:

- a) Pasal 362: Pencurian adalah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- b) Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang
- c) Pasal 372: Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- d) Pasal 378: Perbuatan Curang adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

- e) Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

b. Faktor – Faktor Penyebab Fraud

Cressey (1953) mengemukakan tiga penyebab atau pemicu *fraud* sebagai berikut.

1. Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*)
2. Adanya kesempatan/ peluang (*Perceived Opportunity*)
3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

c. Indikator Pencegahan Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tuanakotta (2007) sebagai salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan kecurangan akuntansi mengategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu:

- a. Korupsi (Corruption)
- b. Penyimpangan Atas Aset (Asset Misappropriation) .
- c. Kecurangan Laporan Keuangan

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Rai (2008:283) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengungkapkan bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Pada Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b) Keandalan Laporan Keuangan
- c) Pengamanan aset negara; dan
- d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008), tiga tujuan umum Sistem Pengendalian Intern antara lain :

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

c. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kerangka pengendalian internal yang telah diterima di sebagian besar lingkup Amerika Serikat adalah kerangka Pengendalian Internal COSO. Terdapat lima komponen kerangka Pengendalian Internal COSO (Elder, Randal J. *et al.*, 2012:321) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Komponen pertama yaitu lingkungan pengendalian digambarkan sebagai payung dari keempat komponen pengendalian lainnya. Berikut adalah komponen Pengendalian Internal COSO :

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Pengawasan

3. Moral

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu 'etika' dari bahasa Yunani dan 'moral' dari bahasa Latin. Moralitas (dari kata sifat Latin *moralis*) memiliki arti yang pada dasarnya sama dengan 'moral', hanya ada nada lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Menurut Welton *et al.* (1994) dalam setiap *stage* Kohlberg, individu memiliki pandangan sendiri mengenai versi 'hal yang benar' menurutnya. Individu dalam *stage* 1 merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu tersebut. Individu dalam *stage* 2 menganggap bahwa hal yang benar adalah hasil dari pertukaran yangimbang, persetujuan

maupun posisi tawar yangimbang. Individu dalam *stage 3* merasa bahwa hal yang benar adalah terkait dengan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas, dan respek dari teman-teman dan keluarganya. Individu dalam *stage 4* menganggap bahwa hal yang benar adalah dengan membuat kontribusi untuk masyarakat, grup atau institusi. Individu dalam *stage 5* dan *stage 6* menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seorang makhluk hidup.

4. Moralitas

a. Pengertian Moralitas

Menurut Bertens (1993), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Menurut Salam (2002), moral berasal dari kata latin *mores*. *Mores* berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Berarti moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut Budiningsih (2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung

jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amrizal (2004), peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dalam suatu organisasi, terutama unit organisasi yang besar dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi.

b. Pentingnya Moralitas.

Kesadaran dalam menjunjung tinggi moralitas merupakan kewajiban untuk mematuhi hukum adalah bukan karena takut pada sanksinya, akan tetapi sebagai kewajiban secara pribadi karena di yakini sebagai hal yang baik menurut hati nurani yang harus di taatinya. Dalam hal ini seseorang yang dapat menjunjung tinggi moralitas, akan dapat menyelenggarakan pemerintahan sebagai berikut:

1. Tidak akan terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Melakukan fungsi pelayanan dan sebagai pelayan masyarakat

dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang adil dan terbaik.

3. Melakukan empowering (pemberdayaan) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
4. Melakukan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat.

Sebagai pemegang komitmen terselenggaranya pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korupsi.

c. Dampak Moralitas

Moralitas sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, karena moral adalah kekuatan/standar untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu tindakan manusia itu sendiri.

Begitupun moralitas sangat berpengaruh terhadap tingkat kecurangan akuntansi mulai dari mekanisme penyusunan anggaran yang akan mempengaruhi perilaku bawahan yaitu mereka akan merespon negatif atau positif apabila tujuan pribadi bawahan dan atasan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya bawahan akan berperilaku negatif apabila anggaran tidak diadministrasikan dengan baik, sehingga bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi. Perilaku ini merupakan perilaku bawahan yang mempunyai konflik dengan tujuan organisasi, hal ini terwujud pada perilaku manajer yang dengan sengaja membuat kecurangan akuntansi.

d. Indikator Moralitas

Menurut Simanjuntak (2008), dalam *GONE theory* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu

- 1) *Greed* (keserakahan).
- 2) Berperilaku etis Menurut survey KPMG dalam Koletar (2003), faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalahgunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang.

B. Hubungan Antar Variabel

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pencegahan *fraud*

Menurut Rai (2008:283) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu : reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasional, dan ketaatan pada hukum dan aturan (Arens,2006:370).

Peterson dan Gibson (2003), secara detail menjelaskan bahwa prosedur pengendalian intern yang jelek berhubungan pada kekurangan dalam pemisahan tugas dan ketidakhadiran rekonsiliasi bebas dari uang dan dokumentasi yang jelek dipandang sebagai faktor dimana

memungkinkan kecurangan untuk terjadi di suatu instansi yang kualitas pengendalian internalnya buruk ataupun rendah.

Rae dan Nava (2008), dalam penelitiannya menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa kejadian penipuan karyawan lebih tinggi terjadi disuatu perusahaan yang kualitas pengendalian internalnya buruk atau rendah. Sehingga berdasarkan yang telah dijelaskan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengendalian intern menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mencegah kecurangan akuntansi (*fraud*).

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan).

Sistem pengendalian intern yang tidak efektif akan membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan perusahaan dan mengganggu keberlangsungan perusahaan, sehingga tujuan dari perusahaan tidak tercapai. Kecurangan akuntansi umumnya dilakukan karena adanya kesempatan dan peluang yang muncul akibat lemahnya pengendalian intern dalam perusahaan.

Sistem pengendalian intern yang lemah, membuat seseorang tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, karena tindakan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh siapapun. Sebaliknya, jika semakin baik sistem pengendalian intern dalam perusahaan maka tindakan kecurangan akuntansi akan

sulit dilakukan, karena setiap kegiatan yang mereka lakukan telah dibatasi dan dikelola sebatas pada tanggung jawab mereka masing-masing terhadap tugasnya. Sehingga setiap kegiatan akan dikontrol oleh bagian lain, jika terjadi kecurangan, maka pihak lain akan mengetahuinya, sehingga setiap orang yang memiliki niat melakukan kecurangan dapat dicegah.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi (*fraud*) dalam perusahaan. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern tersebut semua kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dapat dimonitor dan diawasi oleh manajer sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh karyawan berada di dalam pengawasan dan otorisasi manajer.

H₁: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

b. Moralitas terhadap pencegahan *fraud*

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin “moralis” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Amin (2009) menyatakan bahwa moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan terhadap laporan keuangan. Adanya perubahan tingkah laku atau moral bisa menjadikan seseorang menyalahgunakan kas/aktiva yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi melalui manipulasi terhadap laporan keuangan.

Menurut Simanjuntak (2008) dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

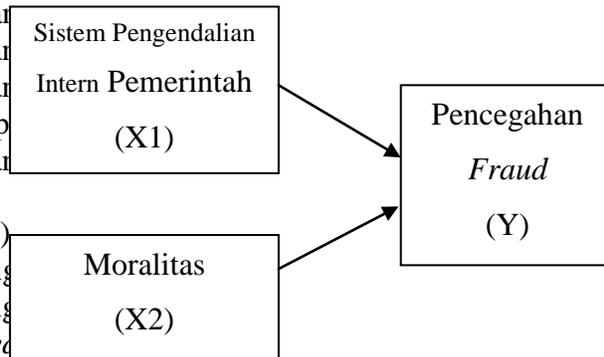
Selain itu, menurut Koletar (2003), penyalahgunaan jabatan merupakan perilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor

ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

H₂: Moralitas berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

C. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan landasan teori dan perkembangan hipotesis maka kerangka konseptual yang diajukan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah SKPD di Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan survey yang telah dilakukan teridentifikasi di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu berjumlah 50 SKPD yang tersebar diseluruh wilayah Limapuluh Kota. Secara umum sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan lebih kurang 150 orang dimana setiap SKPD akan

disebarkan masing-masing 3 kuesioner, yang meliputi 1 untuk Kepala Bagian Keuangan dan 2 untuk Staf Bagian Keuangan. Untuk mendapatkan sampel sesuai dengan ukurannya maka digunakan metode pengambilan sampel adalah *total sampling*. Jenis data yang digunakan adalah primer, Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi syarat. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan penggunaan system kuesioner. Kuesioner disebar kemudian dikirimkan kepada SKPD di Kabupaten Limapuluh Kota.

A. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Secara umum variabel penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan akuntansi (*fraud*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupaya untuk mencegah terjadinya indikasi kecurangan (*fraud*) dan menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*) pada setiap elemen instansi, kemudian menilai risiko terjadinya kecurangan (*fraud risk assessment*) yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh staf karyawan, termasuk bagian atasan, yang bertujuan untuk menjaga kekayaan instansi dari indikasi kecurangan (*fraud*) tersebut.

Untuk mengukur pencegahan kecurangan maka digunakan kuesioner berskala 5 Likert dengan pilihan jawaban sebagai berikut Sangat Setuju

(SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (3), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, untuk mengukur pengendalian intern pemerintah maka digunakan indikator sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian (item pertanyaan 1-2)
- b. Penilaian resiko (item pertanyaan 3-4)
- c. Aktifitas Pengendalian (item pertanyaan 5-6)
- d. Informasi dan Komunikasi (item pertanyaan 7-8)
- e. Pengawasan (item pertanyaan 9-10)

Untuk mengukur pengendalian intern pemerintah maka digunakan kuesioner berskala 5 Likert dengan pilihan jawaban sebagai berikut Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (3), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3. Moralitas

Moralitas adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pada penelitian ini moralitas yang dimaksud adalah moral yang dimiliki oleh pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Limapuluh Kota. Menurut Simajuntak (2008), untuk mengukur

variabel moralitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

- a. Keserakahan (item pertanyaan 1-2)
- b. Berperilaku etis (item pertanyaan 3-6)

Untuk mengukur variabel moralitas maka digunakan kuesioner berskala 5 Likert dengan pilihan jawaban sebagai berikut Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (3), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 50 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten 50 Kota yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Setiap sampel masing-masing SKPD terdiri dari 3 responden. Dari 45 SKPD tersebut disebar 135 kuesioner. Pada batas akhir pengumpulan data kuisisioner yang diterima kembali sebanyak 72 kuisisioner, artinya tidak seluruh kuisisioner diisi dan dikembalikan oleh responden. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuisisioner adalah tanggal 8 maret 2017 sampai dengan 29 maret 2017. Gambaran penyebaran dan pengembalian kuisisioner dapat dilihat dalam Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa dari 50 SKPD yang ada di Kabupaten 50

Kota, yang disebar 29 SKPD dan 83% mengembalikan dan mengisi kuisisioner dengan lengkap. Kuisisioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung oleh peneliti.

B. Analisis Deskriptif

1. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden yang bekerja pada Instansi pemerintah kabupaten 50 Kota yang dijadikan sampel penelitian ini. Berdasarkan data yang diisi oleh responden pada kuisisioner penelitian, diketahui karakteristik responden disajikan secara umum menurut jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan lama bekerja. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 48,6% atau sebanyak 35 orang, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 51,4% atau sebanyak 37 orang. Berdasarkan kuisisioner yang dikumpulkan dari setiap responden yang ada pada setiap SKPD yang bekerja di Instansi pemerintah daerah kabupaten 50 Kota diperoleh data tentang latar belakang pendidikan responden. Adapun secara lengkap data tentang responden berdasarkan latar belakang pendidikan disusun dalam Tabel 6 sebagai berikut: Berdasarkan tabel 6 diatas terlihat bahwa latar belakang pendidikan responden dengan persentase terbesar adalah pada tingkat Strata 1 (S1) sebesar 43,06% atau sebanyak 31 orang. Selanjutnya pada tingkat Diploma 3 sebesar 30,55% atau sebanyak 22 orang, pada pada tingkat

SMA sebesar 20,83% atau sebanyak 15 orang, pada tingkat Strata 2 (S2) sebesar 4,17 atau sebanyak 3 orang dan Strata 3 (S3) sebesar 1,39% atau sebanyak 1 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya yang bekerja di instansi pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota yang menjadi responden pada penelitian ini berpendidikan paling banyak pada strata 1 (S1). Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari kasubag pada masing-masing SKPD yang bekerja di instansi pemerintah daerah kabupaten 50 Kota diperoleh data tentang lama bekerja. Adapun secara lengkap data tentang responden berdasarkan lama bekerja ini tersusun dalam Tabel 7 . Berdasarkan Tabel 7 diatas terlihat bahwa masa kerja responden dengan persentase terbesar adalah lebih dari 6-10 tahun yaitu sebesar 37,5% atau sebanyak 27 orang. Selanjutnya diikuti masa kerja 1-5 tahun sebesar 33,33% atau sebanyak 24 orang, untuk masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 29,17% atau 21 orang.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Dan Moralitas Pegawai Dalam Pencegahan *Fraud* di kabupaten 50 kota. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

1. Distribusi variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

Distribusi frekuensi skor kecenderungan kecurangan laporan

keuangan dengan 14 item pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel kecurangan laporan keuangan diatas dapat dilihat bahwa variabel kecurangan laporan keuangan memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 1, yaitu 93,89% dengan kategori sangat baik. Pernyataan item 1 merupakan pernyataan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa para karyawan akan melakukan apapun untuk menambah keuntungan pribadinya, walaupun dengan melakukan korupsi. Sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 5, yaitu sebesar 86,11% dengan kategori sangat baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 89,77% Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel Pencegahan Fraud adalah sangat baik.

2. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Distribusi frekuensi skor kesesuaian kompensasi dengan 8 item pernyataan. Berdasarkan Tabel 9 distribusi frekuensi variable sistem pengendalian intern pemerintah diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian tertinggi pada item nomor 1 yaitu 88,33% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kabupaten Lima Puluh Kota mengetahui dengan jelas uraian tugas mengenai wewenang dalam instansi. Sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 6 dan 8, yaitu sebesar 84,44% dengan kategori

sangat baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden dalam variabel ini adalah 86%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah sangat baik.

3. Moralitas Pegawai (X_2)

Distribusi frekuensi skor Moralitas Pegawai dengan 6 item pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel Motivasi adalah sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 10 distribusi frekuensi variabel moralitas pegawai diatas, terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor 2 yaitu 70,00% dengan kategori baik. Dimana pimpinan SKPD menyusun LRA seperti kondisi yang sebenarnya demi mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah, mempunyai kategori yang baik. Sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu item pernyataan nomor 5 yaitu dengan 49,44%. Sementara itu tingkat capaian rata-rata dari moralitas pegawai adalah sebesar 56,3%. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas pegawai pada pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota dikategorikan cukup baik.

D. Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel terikat adalah pencegahan fraud dan variabel bebas adalah sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas pegawai. Berikut ini data statistik deskriptif masing-masing variabel. Dari tabel 12 diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 orang responden. Untuk variabel pencegahan fraud (Y) memiliki nilai rata-rata 49.38 dengan standar deviasi 4,616 , Untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 42.99 dengan deviasi standar 3.562. Pada variable moralitas pegawai (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar 16.89 dengan deviasi standar 4.106.

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 72$, adalah 0,2319. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel 13. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 dan Y adalah valid. Dari tabel diatas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen pencegahan fraud (Y) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,546, untuk sistem pengendalian interen pemerintah (X_1)

nilai instrumen terkecil adalah 0,360, untuk moralitas pegawai (X_2) nilai terkecil 0,299.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada tabel 14 berikut ini, Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai keandalan *Cronbach's Alpha* yaitu untuk instrumen Pencegahan Fraud adalah 0,924, untuk instrumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 0,859, untuk Moralitas Pegawai adalah 0,733. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,60 ini mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

E. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi sederhana maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri atas :

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah

dalam uji data penelitian datanya terdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan model *Kolmogorof Smirnov (KS)*, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan > 0.05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil yang menyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal dan diperoleh hasil olahan data *Kolmogorof Smirnov* dengan model *unstandardized* yang terdapat pada Tabel 15. Pada tabel 15 diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,121. Ini berarti nilai signifikansi lebih besar 0,05. Ini mengindikasikan bahwa data tersebut sudah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Gejala multikolonieritas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat di variabel independen dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinieritas maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$. Hasil pengujian asumsi multikolonieritas untuk variabel penelitian ini dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan Tolerance. Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Nilai *tolerance* untuk variabel sistem pengendalian

intern pemerintah (X_1) sebesar 0,993 dengan nilai VIF sebesar 1,007. Untuk variabel moralitas pegawai (X_2) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,993 dengan nilai VIF sebesar 1,007. Masing-masing variabel independen tersebut memiliki angka *tolerance* > 0,10 dan VIF <10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini digunakan uji *gletser*. Pada uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing menunjukkan level $\text{sig} > \alpha$, yaitu 0,534 untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah, 0,911 untuk variabel moralitas pegawai. Hal ini berarti penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

F. Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen

dalam model terhadap variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pada penelitian ini hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 18. Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,101 atau sebesar 10,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,1%. Dan sisanya sebesar 89,9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

2. Uji Regresi Berganda

Analisis data untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk memberikan penjelasan tentang aplikasi spss versi 16 yang telah ditransformasikan kedalam variabel penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada Tabel 19 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 28,796 + 0,463 X_1 + 0,041 X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh adalah 28,796. Hal ini berarti

apabila variabel-variabel independen tidak ada, maka besarnya pencegahan fraud yang terjadi adalah senilai 28,796.

- b. Koefisien Regresi (X_1) sistem pengendalian intern pemerintah
Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) adalah sebesar 0,463. Hal ini menunjukkan bahwa jika kesesuaian sistem pengendalian intern pemerintah meningkat satu satuan, maka kecurangan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,463.
- c. Koefisien regresi (X_2) moralitas pegawai
Nilai koefisien regresi variabel moralitas pegawai (X_2) sebesar 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa jika motivasi meningkat satu satuan, maka moralitas pegawai akan meningkat sebesar 0,041.

G. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji secara serentak pengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian adalah: jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau sig. $< \alpha$ (0,05), maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau sig. $> \alpha$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat. Berikut adalah hasil perhitungan uji F-Test. Hasil pengolahan data pada tabel 20 diatas menunjukkan nilai signifikan pada 0,009 (sig 0,009 $<$ 0,05). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan

regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

2. Uji t

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel 19, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa pengendalian intern pemerintah memiliki nilai sig. $0,002 <$ $0,05$ dengan koefisien β adalah 0,463 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 **diterima**.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah moralitas pegawai tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan tabel 19 diketahui bahwa moralitas pegawai memiliki nilai sig. $0,749 >$ $0,05$ dengan koefisien β adalah 0,041 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas pegawai berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hal ini berarti bahwa H_2 **ditolak**.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pencegahan Fraud

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di setiap SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota telah diterapkan dan berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya fraud.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu perusahaan sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan dalam mencegah terjadinya fraud. Walaupun pengendalian internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya fraud. Dari pernyataan di atas bahwa sebenarnya fraud itu dapat dikurangi bahkan dicegah dengan cara membudayakan iklim kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud, misalnya dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan fraud akan mendapat sanksi setimpal.

Maka pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kaitannya antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* sangat erat. Menurut Tuanakotta (2007), bahwa upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian intern. Disamping pengendalian intern, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya fraud (*fraud risk assesment*).

Manajemen harus melindungi perusahaan dari setiap tindakan yang menimbulkan kerugian. Manajemen harus mengidentifikasi apa yang harus dilindungi (seperti: asset perusahaan), risiko apa yang akan dihadapi, dan menyampaikan risiko tersebut (*probability* dan *impact cost*). Dengan memperhatikan faktor tersebut, manajemen kemudian membuat kebijakan-kebijakan dan strategi yang sesuai untuk mengembangkan struktur perusahaan dari implementasi pengendalian. Kebijakan bisnis dan hukum yang berlaku pada perusahaan membutuhkan manajemen yang menekankan pada keefektifan pengendalian internal dan kekuatan pada lingkungan pengendalian untuk

melindungi asset perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan adanya pengendalian internal yang diterapkan dengan baik, maka hal tersebut mungkin dapat mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam organisasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purwitasari (2013) tentang pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi dalam pencegahan *fraud*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan dalam pencegahan *fraud*.

2. Pengaruh Moralitas Pegawai dalam Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas pegawai tidak berpengaruh signifikan dalam Pencegahan *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki seseorang belum tentu dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

Bila dilihat dari hasil jawaban responden, moralitas pegawai sudah termasuk dalam kategori cukup baik, dengan capaian responden sebesar 56,4%. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pegawai SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota memiliki moralitas yang cukup baik terutama penyusunan LRA oleh pimpinan SKPD seperti kondisi yang sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak merugikan pemerintah lebih diutamakan. Akan tetapi moralitas pegawai yang cukup baik tersebut belum tentu dapat mengurangi kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Dilihat dari jawaban responden ada 2 item pertanyaan, rata-rata banyak menjawab setuju padahal item pertanyaan bermaksud negatif. Hal ini menggambarkan pegawai lebih patuh dan takut terhadap pimpinannya daripada Peraturan Pemerintah (PP) sekalipun pimpinannya berperilaku buruk, seperti menyusun Laporan Realisasi anggaran sama dengan periode sebelumnya agar kinerja pimpinan tersebut terlihat baik. Pimpinan juga memberikan bonus jika pegawai tersebut patuh terhadap perintahnya karena telah membuat kinerja dari pimpinannya terlihat bagus dan baik.

Selain itu moralitas yang tinggi belum tentu dapat mencegah *fraud* di pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota, bisa saja ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masih bisa mencegah terjadinya *fraud*. Seperti tingginya tingkat ketaatan

pegawai terhadap aturan akuntansi di instansi tersebut, kesesuaian informasi dalam suatu instansi, kesesuaian kompensasi dengan kinerja pegawai, dan tingginya sistem pengendalian internal suatu instansi. Individu yang memiliki moral yang tinggi akan dapat menahan diri atau mencegah melakukan kecurangan dalam kondisi apapun. Jadi dapat disimpulkan tingginya moralitas individu di instansi pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota belum tentu dapat mencegah *fraud* di pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah kabupaten Lima puluh kota.
2. Moralitas pegawai tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah kabupaten Lima puluh kota.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji

Adjusted R² sebesar 10,1%. berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen hanya sebesar 10,1%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar lagi untuk pencegahan fraud.

- b. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Saran yang diberikan adalah:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan moralitas pegawai.
- b. Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga data yang diperoleh belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner dilakukan interview/bertanya

langsung ke responden secara tegas dan jelas dan sebaiknya daerah penelitian di perluas ke SKPD kota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim Nizarul M, Trisni Hapsari dan Liliek Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanuridin, Makasar.
- Amin Widjaja Tunggal. 2013. *Corporate Fraud & Internal Control*. Jakarta: Harvarindo
- Ansah, Stephen Owusu., Ganguli, Gouraga. (2010) Voluntary Reporting on Internal Control System and Governance Characteristics : An Analysis of Large U.S Companies, *Journal of Managerial Issues*, 22, 383 – 401.
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. (Alih bahasa: Herman Wibowo). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Association of Certified Fraud Examiner. 2004. *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Dasar Dasar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Bernardin Russel. 2005. *Perilaku Organisasi. Edisi Indonesia*. Gramedia Pustaka, Indonesia.
- Djamal Nasrullah. 2010. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Sektor Publik dan Beberapa Karakteristik Untuk Meningkatkan. Artikel *Dosen DPK Pada STIE Nasional Banjarmasin*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Dasar-dasar Statistik dan SPSS 19*. BPFE, Yogyakarta.
- Gibson L James, John M, Ivancevich, James H Donnelly dan Robert Konopaske. 2011. *Organization Behavior, Structure, Processes*. Fourteenth Edition. Mc Graw-Hill, Irwin.
- Hartanto Yuli Hansiadi dan Indra Wijaya Kusuma. 2001. Analisis Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Judgment Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Hasibuan SP. 2003. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hyde, Julie Christine (2011) .Material Weaknesses in internal control over compliance for federal grants tu US Countries. Dissertation. University of Memphis
- Jogiyanto. 2005. *Analisis Laporan Keuangan dan Pasar Modal*. BPFE, Yogyakarta.
- Kieso Donald E, Weygandt Jerry J dan Terry D Warfield. 2012.

- Intermediate Accounting Fifteenth Edition. Wiley.
- Libby dan Federick. 2001. *Pengaruh Tekanan Ketaatan, Pengalaman, Pengetahuan, Terhadap Ekspektasi Klien Dalam Audit judgment*. Perputakaan Univeristas Bung Hatta, Tidak Dipublikasikan.
- Lisda Hamzah. 2008. *Pengaruh Situasi Audit, Objektivitas, Pengalaman, dan Tingkat Materialitas Auditor Profesional Terhadap Kualitas Hasil Audit*. Artike Akuntansi. Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Mabruri Havid dan Winarna Jaka. 2010. Analisa Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi. XIII. Purwokerto. 2010*.
- Martoyo dan Marinni. 2003. Pengaruh Profesional Auditor, Komitmen Organiasasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Internal. *Seminar Nasional Akuntansi 5*. Makasar.
- Muhamad Zuhri. 2013. Evaluasi Hasil Pemeriksaan Audit. Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Auditing Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pratama Arif. 2012. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Publikasi Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume 1 Nomor 2*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Purwitasari, Anggit. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang (survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung
- Pusdiklat BPKP (2009) Sistem pengendalian manajemen, Edisi lima
- Putri Pratiwi, Eka. 2010. Analisis Pengaruh Komponen Keahlian Internal Auditor dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan (*Fraud*) di Inspektorat Jendral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. SKRIPSI.

- Universitas Syarif
Hidayatullah Jakarta
- Quena Prima Precilia dan Rohman Abdul. 2012. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota atau Kabupaten di Jawa Tengah, Dipenegoro Journal of Accounting Volume 1 Nomor 2 Halaman 1 – 12. Universitas Dipenegoro, Semarang
- Rae, Kristy, dan Subramaniam. 2008. Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organizational justice and employee fraud, *Managerial Auditing Journal*.
- Rahayu Siti Kurnia. 2010. *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Robbins Steven P, & Timothy. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi Indonesia. Salemba Empat, Jakarta
- Sari dan Mardisar Almi, 2007. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit*. *Jurnal Akuntansi*. Volume II Nomor IV. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Sekaran, Uma. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Setiarno Budi Eko dan Januarti. 2006. Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Simanjuntak, Ridwan. 2008. *Pengertian Pencegahan Kecurangan*. Seri Departemen Akuntansi: FEUI.
- Singgih Elisha Muliani dan Iruk Rangga Bawono. 2009. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor di KAP Big Foir di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Soemarso. 2008. *Dasar Dasar Akuntansi I dan II*. BPFE, Yogyakarta.
- Sukriah, Ika Akram dan Biana Adha Inapty. 2008. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektifitasi, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Seminar Nasional Akuntansi 11*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sukrisno Agoes. 2004. *Auditing*. Lembaga Penerbit FE-UI, Salemba Empat. Jakarta
- Suradi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Swasta. Mengurai Pengertian Korupsi. Pendeteksian. Pencegahannya. dan Etika Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

- Sutedja Ibrahim. 2004. Auditing. Andhi, Surabaya.
- Tampubolon, ruthmita. 2015. Pengaruh Peranan Audit Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan. SKRIPSI. Universitas Sumatera Utara
- Taufik, Taufeni. 2011. Pengaruh Peran Inspektorat dalam pencegahan kecurangan (studi pada provinsi dan Kabupaten di Riau). Artikel *Dosen Universitas Riau* pada *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.2, Juli 2011: 512-520

